Received: 30 Apr 2026 ; Revised: 19 Jul 2026 ; Published: 02 Nov 2026

MENGUJI KEPUASAN DEMOKRASI DI TENGAH BONUS DEMOGRAFI BERDASARKAN TEORI FALSIFIKASI KARL POPPER

Krisogonus Kusman[1], Esantus Hasman[2], Louis Diego Liko[3], Angelus Alfonsus Sasi[4], Melkior Kopong Kapuka[5]

1,2,3,4,5,Prodi Filsafat, Institusi Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: [1]krisogonuskusman@gmail.com [3]louisdiegoliko@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to examine the level of public satisfaction with democracy during President Joko Widodo's (Jokowi) two terms in office, particularly in the context of Indonesia's demographic dividend. This article explores the reasons behind the high levels of public satisfaction with democracy during this period, whilst also examining the implications for the potential and challenges of democracy amidst the demographic dividend. Is the state of democracy under President Jokowi's administration truly at a satisfactory level? How does this affect the political participation and perceptions of the demographic dividend generation? To this end, this article examines in greater depth the nature and basis of this public satisfaction. The approach employed is Karl Popper's theory of falsification. Through this theory, truth can be critically tested, rejecting dogmatic views that focus solely on verification. The main hypothesis of this article is the urgency of falsification in determining public satisfaction with democracy during President Jokowi's leadership, whereby the public—particularly the demographic bonus generation—must not express excessive satisfaction without continuous critical scrutiny. The public should always adopt a critical stance and question everything. The theory of falsification can serve as a tool for assessing the state of democracy, so that the public does not hastily conclude that democracy under Jokowi is stable. It is therefore essential to ensure that the demographic dividend acts as a driving force that strengthens democracy, rather than becoming a cause of its decline due to a lack of critical thinking.

Keywords: Falsification, Democracy, Jokowi, Demographic Dividend, Public Satisfaction

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menguji tingkat kepuasan publik terhadap demokrasi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode pemerintahannya, khususnya dalam konteks bonus demografi Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi alasan di balik tingginya kepuasan publik terhadap demokrasi di era tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap potensi dan tantangan demokrasi di tengah bonus demografi. Apakah kondisi

demokrasi pada pemerintahan Presiden Jokowi benar-benar berada pada tingkat yang baik? Bagaimana hal ini memengaruhi partisipasi serta persepsi politik generasi bonus demografi? Untuk itu, artikel ini menelaah lebih dalam mengenai bentuk dan dasar kepuasan publik tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah teori falsifikasi Karl Popper. Melalui teori ini, kebenaran dapat diuji secara kritis, menolak pandangan dogmatis yang hanya berfokus pada verifikasi. Hipotesis utama artikel ini adalah urgensi falsifikasi dalam menentukan kepuasan publik terhadap demokrasi era kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana publik, terutama generasi bonus demografi, tidak boleh memberikan kepuasan berlebih tanpa pengujian kritis yang terus-menerus. Publik seharusnya selalu mengedepankan sikap kritis untuk mempertanyakan segala hal. Teori falsifikasi dapat menjadi alat untuk menguji kondisi demokrasi, sehingga publik tidak mudah menyimpulkan bahwa demokrasi era Jokowi stabil. Karena itu, perlu memastikan bahwa bonus demografi mesti menjadi kekuatan pendorong yang memperkuat demokrasi, bukan biang kemunduran demokrasi akibat minimnya daya kritis.

***Kata Kunci**: Falsifikasi, Demokrasi, Jokowi, Bonus Demografi, Kepuasan Publik*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, selalu berada dalam dinamika politik dan sosial yang menarik untuk dikaji. Dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2024) telah menandai sebuah era dengan karakteristik unik, terutama dalam hal persepsi publik terhadap kondisi demokrasi. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi seringkali diposisikan sebagai representasi masyarakat kecil, sosok yang dekat dengan rakyat, dan bahkan dianggap berhasil memulihkan nilai-nilai demokrasi yang dianggap sempat runtuh pada era sebelumnya. Narasi ini diperkuat oleh citra kesederhanaan dan kebijakan-kebijakan populis, seperti program bantuan sosial (bansos), yang disambut antusias oleh sebagian besar masyarakat. Tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, yang mencapai 75% berdasarkan data Indikator Politik Indonesia, menjadi indikator kuat bagaimana narasi "pemimpin merakyat" ini berhasil melekat dalam benak masyarakat akar rumput, termasuk generasi bonus demografi. Banyak yang tanpa ragu memuji Jokowi sebagai "bapak demokrasi," bahkan menjulukinya

sebagai "Tuhan" yang menyelamatkan masyarakat kecil dari kesenjangan ekonomi dan sosial.

Namun, di balik angka kepuasan yang tinggi ini, muncul pertanyaan krusial yang jarang diangkat secara serius: apakah klaim kepuasan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi yang sehat dan substansial, ataukah hanya sebuah ilusi yang dibentuk oleh retorika dan kebijakan populis semata? Artikel ini berargumen bahwa kepuasan publik yang masif, terutama tanpa disertai daya kritis yang memadai, berpotensi menutupi degradasi demokrasi yang lebih dalam. Realitas menunjukkan adanya jurang ketimpangan yang signifikan, serta laporan dari berbagai pihak yang justru mengindikasikan penurunan drastis dalam bidang demokrasi, penegakan hukum, dan penyelesaian isu hak asasi manusia (HAM) selama sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi. Indeks demokrasi *The Economist Intelligence Unit* (EIU) mencatat penurunan skor demokrasi Indonesia dari 6,85 pada 2014 menjadi 6,35 pada 2023, sebuah indikasi konkret bahwa ada ketidaksesuaian antara persepsi publik dan kondisi objektif demokrasi.

Fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan hadirnya bonus demografi, di mana populasi usia produktif, khususnya generasi muda, mendominasi struktur demografi Indonesia. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan proporsi pemilih muda mencapai 60% dari total wajib pilih pada Pemilu 2024, mengindikasikan kekuatan politik yang luar biasa. Generasi ini, yang sebagian besar terpapar pada citra "merakyat" Jokowi, memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik dan arah politik. Namun, apakah generasi muda ini cukup dibekali dengan pemahaman demokrasi yang mendalam dan daya kritis yang seimbang untuk tidak mudah terbuai oleh narasi tunggal? Atau justru mereka, karena minimnya pengalaman sejarah dan pemahaman politik yang komprehensif, menjadi rentan terhadap manipulasi dan "kebaikan hipokrit" yang mengikis substansi demokrasi?

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut. Bagaimana kondisi demokrasi sebenarnya pada era pemerintahan Jokowi selama dua periode? Mengapa publik, khususnya generasi bonus demografi, cenderung cepat puas tanpa pengujian kritis? Apakah keberhasilan Jokowi hanya diukur dari perspektif bantuan sosial dan citra personal semata, mengabaikan aspek-aspek fundamental demokrasi lainnya?

Untuk menelaah kepuasan publik terhadap demokrasi sepanjang pemerintahan Jokowi, artikel ini akan menggunakan pisau analisis teori falsifikasi Karl Popper. Teori ini, yang menekankan pentingnya pengujian kritis dan kesediaan untuk menyalahkan atau membuktikan kesalahan sebuah proposisi, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengupas klaim-klaim mengenai kesehatan demokrasi. Dengan menerapkan falsifikasi, kita dapat melampaui permukaan kepuasan empiris dan mencari potensi kelemahan serta inkonsistensi yang mungkin terjadi dalam praktik demokrasi. Langkah awal adalah menganalisis kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan selama era Jokowi yang berdampak signifikan terhadap demokrasi, dan kemudian menguji klaim "demokrasi yang stabil dan merakyat" tersebut dari perspektif falsifikasionisme Popper. Pendekatan ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran publik, terutama generasi bonus demografi, akan urgensi sikap kritis demi menjaga keberlangsungan demokrasi yang substantif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis mendalam terhadap kepuasan publik terhadap kondisi demokrasi di era pemerintahan Presiden Jokowi dan implikasinya pada konteks bonus demografi. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi tingkat kepuasan publik, serta realitas demokrasi yang berlangsung. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat

mengeksplorasi secara nuansa bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi persepsi dan partisipasi publik terhadap sistem demokrasi.

Untuk mempertajam dan memberikan kedalaman analisis, tulisan ini secara spesifik mengaplikasikan teori falsifikasi Karl Popper sebagai kerangka teoretis utama. Dengan kerangka falsifikasi, tingkat kepuasan publik terhadap demokrasi di era pemerintahan Jokowi tidak hanya diamati sebagai fakta empiris semata, tetapi diuji validitas dan kebenarannya secara kritis. Teori Popper memungkinkan peninjauan ulang terhadap klaim-klaim positif yang ada, dengan mencari bukti-bukti yang dapat menyangkal atau menunjukkan batas-batas kebenaran dari klaim tersebut. Ini berarti bahwa kepuasan publik yang tinggi terhadap demokrasi tidak serta merta diterima sebagai indikasi demokrasi yang sehat, melainkan dipertanyakan dan dicari potensi "kesalahannya" dalam artian adakah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sebenarnya.

Sumber data dalam artiker ini adalah data-data sekunder, yang meliputi pandangan dan ulasan para pakar politik yang dipublikasikan di berbagai media masa dan artikel ilmiah, baik menjelang maupun sesudah pemilihan umum 2024. Secara fundamental, metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potensi krisis daya kritis publik, khususnya generasi bonus demografi, dalam mengevaluasi dan merasakan kondisi demokrasi yang aktual. Dengan memanfaatkan teori falsifikasi sebagai instrumen pengujian, artikel ini berupaya mengidentifikasi karakteristik sesungguhnya dari keadaan demokrasi pada era pemerintahan Jokowi, melampaui retorika dan citra permukaan. Diharapkan, artikel ini dapat berfungsi sebagai sumber kesadaran bagi publik mengenai urgensi pengujian dan pertanyaan kritis terhadap kondisi demokrasi dalam suatu periode pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik yang lebih informatif dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karl Popper dan Teori Falsifikasi

1.1 Gambaran Umum tentang Karl Popper

Karl Raimund Popper (1902-1994) adalah salah satu filsuf ilmu pengetahuan terkemuka abad ke-20 yang pemikirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap epistemologi, filsafat sosial, dan filsafat politik. Popper lahir di Wina, Austria, pada 28 Juli 1902, tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kaya dan menyaksikan gejolak politik dan ideologi pada masanya. Pengalaman ini membentuk pandangan kritisnya terhadap dogmatisme dan klaim kebenaran mutlak, terutama yang ia lihat dalam ideologi Marxis.

Popper menentang keras kaum Marxis yang ia anggap dogmatis dan cenderung mengandalkan kekerasan sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perubahan sosial. Pengamatannya terhadap kegagalan Marxisme untuk beradaptasi atau mengakui kesalahannya, bahkan ketika dihadapkan pada bukti yang bertentangan, mendorongnya untuk mencari kriteria yang lebih rasional dan terbuka dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis. Ia membedakan secara tegas antara pemikiran dogmatis, yang cenderung mempertahankan keyakinan tanpa mempertanyakan, dan pemikiran kritis, yang selalu siap untuk menguji dan merevisi keyakinannya. Inspirasi kuat bagi Popper datang dari ungkapan Socrates yang terkenal: "Saya tahu bahwa saya tidak tahu." Ini mencerminkan kerendahan hati intelektual dan kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, yang kemudian menjadi fondasi bagi pandangan Popper tentang ilmu pengetahuan sebagai proses eliminasi kesalahan.

Dari perspektif ini, Popper melancarkan kritik tajam terhadap positivisme logis Lingkaran Wina yang sangat dominan pada zamannya. Kaum positivis mengandalkan fakta empiris sebagai satu-satunya kriteria kebenaran ilmiah melalui metode verifikasi. Bagi Popper, verifikasi bersifat abstrak dan

tidak menghasilkan pengetahuan yang sahih secara definitif, melainkan hanya memperkuat teori yang ada tanpa pernah membuktikan kebenarannya secara mutlak. Verifikasi, menurut Popper, rawan terhadap bahaya induktivisme, di mana sejumlah observasi positif tidak pernah dapat menjamin kebenaran universal sebuah teori. Misalnya, melihat jutaan angsa putih tidak pernah membuktikan bahwa *semua* angsa berwarna putih, karena satu angsa hitam saja sudah cukup untuk menyangkalnya. Karena itu, ia memberikan kritik pedas terhadap pandangan kaum positivisme tersebut, dengan argumen bahwa penekanan pada verifikasi justru menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan.

Kritik Popper bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih rasional dan dinamis dalam menguji hipotesis dan teori. Pendekatan ini adalah falsifikasi, di mana sebuah teori ilmiah harus dapat *difalsifikasi* atau *disalahkan* untuk dianggap rasional dan ilmiah. Falsifikasi fokus pada kesalahan sebagai elemen kunci untuk mencegah pengulangan di masa depan. Popper menekankan bahwa kesalahan bersifat konkret dan dapat ditunjuk, sementara kebenaran, terutama dalam ilmu pengetahuan, bersifat dugaan (konjektur) dan selalu tentatif. Oleh karena itu, kesalahan harus menjadi fokus utama dari setiap proposisi ilmiah; kita belajar lebih banyak dari kesalahan kita daripada dari keberhasilan yang belum teruji.

Bagi Popper, verifikasi bukanlah kriteria tunggal kebenaran ilmiah karena pengetahuan bersifat dinamis, tentatif, dan tidak pernah final. Teori ilmiah harus selalu terbuka terhadap kritik dan diskusi rasional. Ilmu pengetahuan berkembang melalui proses "dugaan dan sanggahan" (*conjectures and refutations*), yaitu dengan mengajukan teori yang berani (dugaan) dan kemudian berusaha keras untuk menyanggahnya. Teori yang mampu bertahan dari upaya falsifikasi yang paling ketatlah yang dianggap sahih, meskipun sifat sementaranya tetap diakui. Popper terus mengkritik positivisme yang mengutamakan verifikasi empiris, karena ia melihatnya sebagai pendekatan

yang konservatif dan tidak mendorong inovasi atau pengujian yang sebenarnya.

Selanjutnya, Popper memprioritaskan logika deduktif untuk menghindari ketergantungan buta pada fakta indrawi semata, guna menemukan masalah fundamental dari data empiris. Logika, dalam pandangannya, merefleksikan fakta sebagai pendukung, atau lebih tepatnya sebagai penguji, teori. Ini sebagaimana ditegaskan dalam salah satu karya besarnya, *The Logic of Scientific Discovery* (seringkali diterjemahkan sebagai *Logika Penemuan Ilmiah*, bukan *The Logic of the Social Sciences*). Popper berargumen bahwa pengetahuan sejati muncul dari pemecahan masalah (problem-solving), bukan sekadar pengumpulan data empiris secara pasif. Ilmuwan memulai dengan masalah, mengajukan hipotesis sebagai solusi, dan kemudian mencoba menyanggah hipotesis tersebut melalui pengujian empiris.

1.2 Masalah Demarkasi

Salah satu kontribusi paling signifikan dari Karl Popper adalah solusinya terhadap masalah demarkasi, yaitu bagaimana membedakan antara ilmu pengetahuan (sains) dan non-ilmu pengetahuan (termasuk metafisika, pseudo-sains, atau dogma). Popper mengkritik pandangan kaum positivisme yang dinilainya gagal dalam merumuskan kriteria demarkasi yang jelas. Menurut Popper, kegagalan positivisme menghambat kemajuan teoritis karena mereka cenderung terlalu terpaku pada verifikasi sebagai kriteria, tanpa menganalisis lebih dalam status ilmiah dari teori-teori yang mereka hasilkan. Ilmu yang diverifikasi berkali-kali bisa saja tetap salah, dan karena itu tidak sejati-nya ilmiah.

Oleh karena itu, Popper mengusulkan bahwa kriteria utama demarkasi bukanlah verifiabilitas (kemampuan untuk dibuktikan benar), melainkan falsifiabilitas (kemampuan untuk dibuktikan salah). Ia berpendapat bahwa kriteria demarkasi harus bersifat imparsial dan tidak memihak, berlaku

universal untuk semua klaim yang ingin disebut ilmiah. Atas dasar itu, Popper secara gencar mengkritisi verifikasi kaum positivisme dan mengajukan beberapa kriteria demarkasi, yakni:

- Proposisi ilmiah bersifat sintetis. Setiap proposisi ilmiah harus bersifat sintetik, yang berarti bahwa proses penyimpulan ilmiah harus didasarkan pada kenyataan atau pengalaman yang telah terjadi. Melalui kriteria ini, Popper menekankan pentingnya pengamatan ilmiah terhadap fakta-fakta untuk menghasilkan penjelasan yang valid terkait pernyataan sintetis.

- Pernyataan ilmiah tidak metafisik. Setiap pernyataan ilmiah tidak harus dipahami secara murni rasionalistik, melainkan perlu disesuaikan dengan konteks yang relevan. Dalam hal ini, Popper menyarankan agar kaum positivisme tidak membatasi diri pada fakta-fakta empiris semata. Ia mengakui peran filsafat dan teologi dalam melampaui batasan empiris untuk menelaah secara rasional. Oleh karena itu, Popper menegaskan pentingnya setiap bidang ilmu untuk membatasi diri dan berfokus pada area keahliannya masing-masing.

- Setiap pernyataan memiliki potensi falsifikasi. Artinya, setiap pernyataan ilmiah harus dapat diuji. Metode yang tepat untuk menguji pernyataan ini adalah metode deduktif. Popper memprioritaskan metode deduktif bagi peneliti untuk menguji teori yang telah dirumuskan dengan membandingkannya pada fakta-fakta empiris. Dengan kata lain, fakta-fakta empiris berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan kebenaran atau kesalahan suatu pernyataan ilmiah, bukan untuk memverifikasinya.

1.3 Prinsip Falsifikasi

Prinsip falsifikasi merupakan inti dari metodologi Popperian untuk menguji sebuah teori. Pengujian ini hanya dapat dilakukan melalui pendekatan deduktif, berbeda dengan pendekatan induktif yang dianut positivisme. Bagi Karl Popper, metode deduktif adalah cara yang tepat untuk menguji proposisi ilmiah karena ia memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang spesifik dari teori-teori umum, yang kemudian dapat diuji dengan observasi atau eksperimen.

Popper menekankan bahwa falsifikasi adalah parameter penting bagi ilmu pengetahuan. Sebuah teori dapat dianggap ilmiah jika memiliki potensi untuk disangkal atau dibuktikan kesalahannya. Semakin besar potensi sebuah teori untuk disalahkan (semakin spesifik dan berani klaimnya), semakin ilmiah teori tersebut. Popper menganjurkan agar falsifikasi menjadi unsur utama dalam setiap proposisi teori, sehingga teori tersebut, jika berhasil bertahan dari upaya falsifikasi, dapat setidaknya mendekati kebenaran (verisimilitude), meskipun kebenaran absolut tidak pernah tercapai.

Terkait dengan prinsip ini, Popper menegaskan bahwa sebuah sistem ilmiah dapat dinyatakan salah jika proposisi-proposisi dasar yang mempresentasikan suatu fakta dapat menyangkal sistem ilmiah yang ada. Artinya, jika ada satu saja observasi atau eksperimen yang bertentangan dengan prediksi teori, maka teori tersebut harus dianggap salah dan ditinggalkan atau direvisi. Prinsip falsifikasi menuntut pembentukan kolaborasi kritis yang ketat agar sebuah teori dapat mencapai kepastian yang jelas mengenai keberhasilan dan kegagalannya dalam pengujian kritis. Ilmuwan harus secara aktif mencari bukti yang dapat menyanggah teori mereka, bukan hanya mencari bukti yang mendukungnya.

Berdasarkan kajian tersebut, Popper menegaskan urgensi falsifikasi dalam seluruh aktivitas ilmiah dan pemikiran kritis. Baginya,

falsifikasi adalah satu-satunya kriteria yang tepat untuk membuat suatu hipotesis menjadi masuk akal dan ilmiah. Popper menggarisbawahi bahwa setiap proposisi memiliki kemungkinan untuk salah. Setiap teori ilmiah harus bertolak dari permasalahan yang telah terjadi atau observasi yang kontradiktif. Dengan kata lain, kesalahan menjadi fokus terpenting dalam penelitian ilmiah. Tujuan utama penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis yang ada, bukan membenarkannya secara definitif, karena kebenaran definitif adalah fatamorgana.

Oleh karena itu, Popper secara eksplisit menghendaki agar sebuah teori ilmiah tidak diterima begitu saja tanpa pengujian yang ketat. Teori ilmiah mesti selalu diuji secara berkelanjutan. Artinya, semakin mampu sebuah teori ilmiah bertahan terhadap kritik dan upaya falsifikasi yang paling keras, semakin baik pula teori tersebut (semakin mendekati kebenaran). Namun, hal ini tidak berarti Popper menolak keberadaan kebenaran ilmiah sama sekali. Popper masih mengakui adanya kebenaran ilmiah, tetapi kebenaran tersebut bersifat sementara dan selalu terbuka untuk disanggah. Sebuah teori dianggap "benar" atau "valid" hanya selama ia belum berhasil difalsifikasi oleh bukti empiris atau argumen logis yang lebih kuat. Ini adalah pandangan yang revolusioner, mengubah paradigma dari pencarian "bukti" menjadi pencarian "sanggahan".

2. Demokrasi

2.1 Pandangan Umum tentang Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani: *demos* (rakyat) dan *kratos* atau *cratein* (pemerintahan). Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan secara harafiah sebagai pemerintahan oleh rakyat. Konsep ini telah ada sejak Zaman kuno, di mana filsuf klasik Aristoteles, yang kerap disapa bapak demokrasi, mendefinisikannya sebagai suatu kekuasaan yang berada di bawah kendali rakyat dan terbatas dari

kepentingan individu. Esensi demokrasi ini menekankan bahwa pembentukan sistem pemerintahan demokratis hanya dapat terwujud dari kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebebasan publik, partisipasi dan akuntabilitas.

Demokrasi memiliki peran fundamental bagi eksistensi suatu negara karena kekuasaan yang dijalankan idealnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini seringkali dikaitkan dengan karakteristik liberal, yang berarti memberikan ruang bagi warga negara untuk memperoleh hak-haknya secara leluasa, seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan memilih, sehingga menjadikannya pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat yang pluralistik. Idealnya, demokrasi dipandang sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang berbasis pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Meskipun implementasinya dalam realitas seringkali menghadapi berbagai tantangan, kontradiksi, dan kompleksitas, mulai dari masalah korupsi, polarisasi politik, hingga kesenjangan ekonomi, demokrasi tetap dianggap sebagai satu-satunya sistem yang paling menjanjikan untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan warga negara dari tirani dan otoritarianisme. Melalui prinsip-prinsip demokratis yang ideal, keadilan dan kebebasan dapat diwujudkan bagi setiap lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Haryatmoko menjelaskan bahwa demokrasi dapat difungsikan sebagai medium bagi warga negara untuk mencapai kebebasan, keadilan, kesamaan, kesejahteraan, dan keamanan, asalkan martabat setiap individu warga negara senantiasa dihargai. Kondisi ideal ini dapat tercapai apabila mekanisme demokrasi secara konsisten mencerminkan kehendak umum yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ini berarti bahwa keputusan politik tidak hanya dibuat oleh representasi rakyat, tetapi juga melalui proses yang memungkinkan rakyat untuk secara aktif terlibat, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban.

Sejalan dengan pandangan tersebut, F. Budi Hardiman memperdalam pemahaman mengenai demokrasi dengan menegaskan bahwa rakyat adalah subjek yang berdaulat, yang berhak memerintah atas dirinya sendiri tanpa adanya intervensi kekuasaan dari otoritas lain yang tidak sah. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, perlu ada suatu diskursus demokrasi yang legitim untuk menjamin kedaulatan warga negara. Hardiman, terinspirasi oleh pemikiran Habermas, mengusulkan konsep demokrasi deliberatif sebagai bentuk diskursus penjamin kedaulatan tersebut. Demokrasi deliberatif dianggap sebagai jalan tengah untuk menciptakan musyawarah publik yang rasional dan koheren, di mana keputusan-keputusan dibuat berdasarkan argumen yang terbaik dan bukan hanya kekuasaan atau kepentingan semata. Dengan demikian, kontrol terhadap proses-proses demokratis dapat dilakukan secara lebih efektif dan substantif, memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berasal dari dan untuk rakyat.

2.2 Meneropong Situasi Demokrasi di Indonesia Era Pemerintahan Jokowi

Untuk menganalisis situasi demokrasi Indonesia kontemporer, khususnya pada era pemerintahan Presiden Jokowi, sangat relevan untuk meninjau kembali pengalaman historis negara lain yang menawarkan paralel signifikan. Salah satu studi kasus yang menarik adalah Republik Peru, di mana kerusakan demokrasi terjadi secara tak terduga, dengan seorang pemimpin yang awalnya dipandang populis bertransformasi menjadi otoriter.

Pada tahun 1990, Alberto Fujimori, seorang demagog berdarah Jepang, muncul sebagai figur sentral dalam sejarah politik Peru. Meskipun tidak dikenal luas oleh publik sebelumnya, Fujimori menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap krisis ekonomi yang melanda Peru, yang kala itu dipicu oleh kekerasan internal (terorisme dari Sendero Luminoso), hiperinflasi, dan korupsi yang merajalela. Kondisi ini mendorongnya terjun ke dunia politik, meskipun dengan keterbatasan finansial dan dukungan partai politik yang lemah. Ia

membentuk partainya sendiri, untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan presiden Peru. Kehadiran Fujimori mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dengan janji untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat Peru dan memberantas masalah ekonomi. Ia berhasil memenangkan pemilihan, mengalahkan Mario Vargas Llosa, seorang penulis novel terkemuka dan penerima penghargaan Nobel Sastra, yang dianggap elit dan abai terhadap aspirasi rakyat kecil. Kemenangan Fujimori mencerminkan ekspresi harapan baru dari kaum populis yang mendambakan perubahan radikal.

Namun, harapan perubahan tersebut tidak terealisasi sesuai ekspektasi demokratis. Pemerintahan Fujimori justru diwarnai kritik tajam dari kelompok oposisi yang menyoroti kebijakan-kebijakan yang semakin sentralistik dan cenderung mengabaikan checks and balances. Sayangnya, kritik ini tidak direspons secara konstruktif. Sebaliknya, Fujimori justru menganggap oposisi sebagai musuh negara, penjahat, atau teroris yang memicu konflik serius dan menghambat program pemerintahannya. Oposisi "terus-menerus mengkritik" Fujimori, menuduhnya sebagai perusak demokrasi, yang kemudian membangkitkan kemarahan publik yang sudah termobilisasi oleh narasi populis, dan memicu wacana pemakzulan. Fujimori merespons dengan tindakan yang semakin otoriter, berupaya mengendalikan seluruh elemen pemerintahan melalui dekrit-dekrit presiden yang seringkali tidak melalui prosedur legislatif yang semestinya. Mayoritas dekrit tersebut tidak disetujui oleh kongres karena dianggap mengancam kebebasan sipil dan melemahkan institusi demokrasi, yang justru semakin memicu kemarahan Fujimori. Puncaknya, pada 5 April 1992, Fujimori secara sepihak membubarkan kongres, menangguhkan konstitusi, dan mengendalikan lembaga peradilan, sebuah tindakan yang dikenal sebagai *autogolpe* (kudeta diri). Tindakan ini secara eksplisit menunjukkan karakter otoriter Fujimori, yang menyalahgunakan kekuasaan

demi ambisi pribadi dan konsolidasi kekuasaan, dengan dampak merugikan yang parah bagi demokrasi Peru.

Situasi demokrasi di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan beberapa kemiripan yang mengkhawatirkan dengan pola yang terjadi di Peru, meskipun dalam tingkat dan manifestasi yang berbeda. Sejak reformasi pasca-Orde Baru pada 1998, demokrasi di Indonesia telah menjadi entitas yang dinamis, namun pertumbuhannya kadang tidak stabil bahkan cenderung terancam oleh praktik-praktik yang menggerus prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi memainkan peran signifikan dalam menentukan arah dan bahkan "pemenang" kontestasi politik, melampaui posisi seorang kepala negara yang seharusnya menjaga netralitas. Sebagai contoh ekstrem, partisipasinya dalam upaya meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden melalui politisasi hukum dan undang-undang (melalui perubahan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres), serta dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) di tengah ketidakpastian ekonomi global, telah menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Tindakan-tindakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi lembaga negara dan integritas proses demokrasi.

Otto Gusti Madung menjelaskan bahwa praktik-praktik semacam ini tidak didasarkan pada diskursus demokratis yang berlandaskan kebenaran dan argumen rasional, melainkan berakar pada penggunaan kekuasaan semata untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Ini adalah manifestasi dari apa yang Jürgen Habermas sebut sebagai "kolonisasi dunia kehidupan" oleh sistem, di mana logika kekuasaan dan kepentingan merusak ruang publik yang seharusnya rasional dan deliberatif. Ironisnya, mayoritas rakyat (termasuk sebagian besar generasi bonus demografi) tidak sepenuhnya menyadari

permasalahan ini dan masih mempertahankan persepsi bahwa demokrasi berada dalam kondisi stabil, atau bahkan percaya bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah demi kebaikan rakyat. Dalam konteks ketidakmampuan publik untuk secara kritis mengevaluasi fenomena ini, potensi kemunduran demokrasi (democratic backsliding) semakin terbuka lebar.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa pemimpin dengan latar belakang populis, seperti Fujimori dan Jokowi (dalam beberapa aspek), tidak selalu berhasil memenuhi aspirasi rakyat secara substantif dalam kerangka demokrasi. Dalam kasus-kasus ini, pemimpin populis seringkali gagal dalam menginstitusionalisasikan ide-ide populis mereka ke dalam sistem demokrasi yang kokoh karena keengganan untuk berkolaborasi dengan institusi lain, kecenderungan untuk meminggirkan oposisi, dan memihak kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan umum. Populisme, jika tidak diimbangi dengan kuatnya institusi demokratis dan daya kritis masyarakat, dapat menjadi jalan menuju otoritarianisme yang terselubung.

2.3 Bonus Demografi Sebagai Tantangan dan Peluang Demokrasi di Indonesia

Bonus demografi merupakan suatu periode krusial dalam perkembangan suatu negara yang berpotensi besar untuk memacu kemajuan ekonomi dan sosial secara signifikan. Susen, dalam karyanya *Eksplorasi Bonus Demografi, Keluarga Berencana dan Masa Depan Pembangunan Keluarga*, menguraikan bahwa bonus demografi dapat menghasilkan perubahan positif apabila produktivitas penduduk dapat dikelola secara optimal melalui investasi pada pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Senada dengan pandangan tersebut, Lutfi Sheykal mengartikan bonus demografi sebagai keuntungan ekonomi yang bersumber dari tingginya proporsi penduduk dalam usia produktif (biasanya antara 15-64 tahun) dibandingkan dengan usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Dengan demikian, bonus demografi mempresentasikan kondisi struktural demografi suatu negara di mana

kelompok usia produktif mendominasi populasi, sehingga berpotensi menjadi kekuatan pendorong bagi akselerasi pembangunan nasional melalui peningkatan tenaga kerja, inovasi, dan konsumsi domestik.

Namun, potensi besar ini tidak lepas dari risiko dan tantangan signifikan, terutama dalam konteks demokrasi. Tanpa diimbangi pengelolaan yang strategis dan kebijakan yang terencana dengan baik, bonus demografi dapat berubah menjadi "bencana demografi" atau "kutukan demografi". Jika tidak ada investasi yang memadai dalam sumber daya manusia produktif, seperti pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang terjangkau, dan lapangan kerja yang cukup, maka tingginya jumlah usia produktif justru akan menciptakan pengangguran massal, peningkatan angka kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Lebih jauh lagi, jika terjadi distorsi kebijakan yang menghambat optimalisasi potensi sumber daya manusia produktif—misalnya, melalui kebijakan yang tidak inklusif, korupsi, atau polarisasi politik—maka bonus demografi dapat memperparah masalah yang ada dan bahkan menjadi beban bagi pembangunan demokrasi.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, generasi bonus demografi, yang didominasi oleh kaum muda, memiliki karakteristik unik. Mereka adalah *digital natives*, terbiasa dengan akses informasi yang cepat dan interaksi sosial melalui media digital. Mereka juga cenderung lebih idealis, cepat beradaptasi, namun di sisi lain, dapat rentan terhadap informasi yang dangkal, *hoax*, atau narasi populis yang kuat. Keterlibatan mereka dalam politik seringkali melalui saluran non-tradisional, seperti media sosial, dan tidak selalu diiringi dengan pemahaman mendalam tentang proses dan institusi demokrasi.

Sebagai peluang bagi demokrasi, generasi bonus demografi dapat menjadi agen perubahan yang kuat untuk: *Pertama,* meningkatkan partisipasi politik: Dengan jumlah yang besar, mereka dapat membawa suara dan perspektif baru dalam pemilihan umum dan ruang publik. *Kedua,* mendorong inovasi dan

transparansi: Keterbukaan terhadap teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan platform partisipasi yang lebih transparan dan efisien. *Ketiga,* memperkuat kontrol sosial: Dengan kapasitas literasi digital yang tinggi, mereka berpotensi menjadi pengawas kebijakan pemerintah yang efektif. Namun di sisi lain, sebagai tantangan bagi demokrasi, generasi bonus demografi juga rentan terhadap beberapa hal krusial: *Pertama,* minimnya literasi politik dan daya kritis: Keterpaparan informasi yang berlebihan tanpa filter kritis dapat menyebabkan mereka mudah terpengaruh narasi populis atau *buzzer* politik. *Kedua, a*patisme politik: Jika aspirasi mereka tidak terakomodasi atau mereka kecewa dengan praktik politik yang kotor, mereka bisa menjadi apatis dan menarik diri dari partisipasi politik substantif. *Ketiga,* polarisasi dan fragmentasi: Perbedaan pandangan yang tajam, terutama yang didorong oleh *echo chambers* di media sosial, dapat memperdalam polarisasi dan menghambat dialog konstruktif. *Keempat,* eksploitasi politik: Penguasa atau elit politik dapat memanfaatkan idealisme dan kurangnya pengalaman politik generasi muda untuk kepentingan elektoral jangka pendek, seperti mempolitisasi bantuan sosial atau isu-isu populis lainnya.

Oleh karena itu, dalam konteks analisis falsifikasi, penting untuk menguji sejauh mana generasi bonus demografi di Indonesia telah berhasil menjadi kekuatan pendorong bagi demokrasi yang lebih sehat, atau sebaliknya, tanpa disadari, menjadi penopang bagi praktik-praktik yang mengikis demokrasi. Apakah mereka telah mengaplikasikan daya kritis Popperian dalam mengevaluasi pemimpin dan kebijakan, ataukah mereka justru mudah memberikan kepuasan berlebihan berdasarkan citra dan janji-janji permukaan?

3. Analisis terhadap Demokrasi Era Pemerintahan Jokowi di Tengah Bonus Demografi Berdasarkan Teori Falsifikasi Karl Popper

3.1 Falsifikasi Kepuasan Publik di Era Bonus Demografi

Teori falsifikasi Karl Popper, yang menekankan keterbukaan terhadap kritik dan pengujian hipotesis dengan tujuan mencari kesalahan, memiliki relevansi signifikan dalam menganalisis esensi demokrasi. Baik falsifikasi maupun demokrasi menghendaki adanya ruang untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang dianggap benar, guna mencari kebenaran yang lebih koheren dan menghindari dogmatisme. Keduanya sama-sama menentang pandangan yang mengklaim kebenaran mutlak atau tak terbantahkan, serta membuka diri terhadap kemungkinan adanya kekeliruan dalam suatu proposisi atau sistem. Dalam konteks demokrasi, ini berarti bahwa klaim tentang "demokrasi yang stabil" atau "pemimpin yang merakyat" harus selalu diuji dan tidak diterima begitu saja sebagai kebenaran final.

Namun, dalam konteks politik Indonesia, khususnya selama era pemerintahan Presiden Jokowi, implementasi demokrasi sering kali menghadapi tantangan serius. Demokrasi, dalam banyak kasus, menjadi kurang efektif sebagai sarana partisipasi otentik dan kontrol publik karena masyarakat akar rumput cenderung terpengaruh oleh strategi politik penguasa dan citra populis yang dibangun. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis yang pernah diajukan oleh Fujimori setelah pemilihannya di Peru, "apakah kita benar-benar negara demokrasi?" Pertanyaan ini sangat relevan untuk dieksplorasi dalam periode pemerintahan Jokowi dan bisa juga untuk pemerintahan setelahnya, karena menuntut refleksi mendalam tentang substansi demokrasi, bukan hanya formalitasnya.

Jika dianalisis melalui lensa falsifikasi Popper, beberapa kebijakan dan praktik selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan indikasi menjauh dari prinsip-prinsip demokratis, meskipun secara permukaan mungkin tampak menguntungkan rakyat. Klaim tentang "kepuasan publik yang tinggi" dapat dianggap sebagai "verifikasi" awal terhadap keberhasilan

demokrasi di era Jokowi. Namun, falsifikasi akan menuntut kita untuk mencari bukti-bukti atau fenomena yang dapat menyanggah klaim tersebut.

Fenomena-fenomena yang dapat menjadi potensi falsifikasi terhadap klaim demokrasi yang sehat di era Jokowi yakni:

- Politisasi Hukum dan Konstitusi: Contoh paling menonjol adalah perubahan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon wakil presiden yang memungkinkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam Pemilu 2024. Peristiwa ini memicu kritik keras dari banyak pihak sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi politik terhadap lembaga peradilan, yang mengikis independensi hukum dan konstitusi. Jika hukum dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik dinasti, maka klaim demokrasi yang menghormati supremasi hukum menjadi tidak valid.

- Penyalahgunaan Undang-Undang dan Kebijakan Publik: Kebijakan *Omnibus Law* Cipta Kerja, misalnya, dianggap oleh banyak kalangan (pekerja, aktivis lingkungan, akademisi) sebagai upaya yang kurang partisipatif dan cenderung menguntungkan segelintir investor atau elit, dengan mengabaikan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Proses pembentukannya yang terkesan terburu-buru dan minimnya dialog dengan masyarakat sipil menjadi indikasi pelemahan deliberasi demokratis.

- Politisasi Bantuan Sosial (Bansos): Penggunaan bansos menjelang pemilihan umum, meskipun diklaim sebagai upaya membantu masyarakat, seringkali dituding sebagai alat untuk memengaruhi pilihan politik rakyat. Jika kesejahteraan sosial digunakan sebagai instrumen politik untuk mengamankan dukungan elektoral, maka

partisipasi politik rakyat tidak lagi didasarkan pada kesadaran kritis, melainkan pada ketergantungan atau insentif material. Ini membahayakan prinsip *one person, one vote, one value*.

- Pembatasan Ruang Sipil dan Kebebasan Berpendapat: Laporan dari berbagai organisasi HAM dan kebebasan sipil menunjukkan adanya indikasi penyempitan ruang bagi kritik, pembatasan demonstrasi, dan penggunaan undang-undang ITE untuk membungkam suara-suara kritis, termasuk dari kalangan akademisi dan jurnalis. Jika kebebasan berpendapat, yang merupakan pilar utama demokrasi, terancam, maka klaim demokrasi yang sehat menjadi diragukan.

- Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti-korupsi ini juga menjadi salah satu indikator penurunan kualitas demokrasi dan penegakan hukum. Korupsi adalah musuh demokrasi, dan pelemahan institusi yang memberantasnya adalah indikasi yang jelas bahwa sistem demokrasi sedang terkikis.

Ironisnya, di tengah kondisi ini, sebagian besar publik, khususnya generasi bonus demografi, masih mempertahankan persepsi bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang demokratis dan terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa citra "merakyat" yang telah melekat pada Jokowi begitu kuat, sehingga berbagai tindakan yang seharusnya dipertanyakan dan berpotensi memfalsifikasi klaim demokrasi, justru dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan wajar. Daya tarik figur kepemimpinan yang populis seringkali mampu menutupi inkonsistensi terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang lebih mendasar.

Sikap apatis atau kurang kritis dari masyarakat secara kolektif membuka celah lebar bagi para elit untuk memanipulasi proses demokrasi. Kurangnya

daya kritis publik menyebabkan mereka mudah terperdaya oleh "kebaikan hipokrit" sebagaimana disampaikan oleh Yanuar Nugroho. Ini adalah kondisi di mana masyarakat terkecoh dalam memahami substansi demokrasi, melihat tindakan populis sebagai kebaikan sejati, padahal di baliknya mungkin ada motif politik yang menggerogoti fondasi sistem. Akibatnya, demokrasi di Indonesia berisiko kehilangan substansinya dan hanya menjadi hegemoni yang menguntungkan segelintir pihak, sementara partisipasi publik hanya menjadi formalitas tanpa kekuatan transformatif.

Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan pergeseran paradigma dari demokrasi liberal yang pasif menuju model demokrasi antagonis atau setidaknya demokrasi yang lebih militan dan partisipatif. Demokrasi antagonis menuntut perlawanan aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang hipokrit, manipulatif, dan tidak demokratis, agar kepentingan publik tidak tenggelam dalam dominasi kepentingan elit. Ini bukan berarti kekerasan, tetapi lebih kepada perjuangan politik yang kuat dan terus-menerus dalam ruang publik untuk membongkar klaim-klaim palsu dan mempertahankan prinsip-prinsip demokratis.

Oleh karena itu, sangat penting bagi publik, terutama generasi bonus demografi, untuk senantiasa bersikap kritis terhadap para pemimpin yang mengklaim "merakyat" atau menjanjikan "stabilitas." Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus terus-menerus diuji dan dievaluasi secara objektif, tidak hanya berdasarkan dampak permukaan atau citra personal. Dalam konteks ini, teori falsifikasi Karl Popper menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk melakukan pengujian kritis terhadap klaim-klaim politik dan kebijakan. Jika klaim "demokrasi yang stabil dan baik" difalsifikasi oleh bukti-bukti praktik yang otoriter atau non-demokratis, maka publik harus berani menyimpulkan bahwa klaim tersebut salah, dan menuntut perbaikan. Selain itu, perlu memastikan bahwa demokrasi tidak hanya sekadar nama atau

formalitas elektoral, tetapi juga memiliki substansi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Peran Bonus Demografi dalam Falsifikasi Demokrasi

Generasi bonus demografi, dengan jumlah yang masif dan pengaruh elektoral yang signifikan, memegang kunci dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Mereka dapat menjadi pendorong utama bagi pengujian kritis terhadap demokrasi, atau sebaliknya, menjadi faktor yang mempercepat kemunduran demokrasi karena minimnya daya kritis. Dari perspektif falsifikasi, peran bonus demografi dapat dilihat dalam beberapa aspek:

- Potensi sebagai Agen Falsifikasi: Generasi muda, dengan akses informasi yang luas dan semangat idealisme, memiliki potensi besar untuk menjadi agen yang aktif dalam menguji dan menyanggah klaim-klaim politik. Jika mereka melek politik, berpendidikan tinggi, dan memiliki kesadaran kritis, mereka akan mampu mengidentifikasi inkonsistensi antara retorika pemimpin dan realitas kebijakan. Mereka dapat menjadi "penguji" yang keras terhadap "hipotesis" bahwa demokrasi berjalan baik, dengan mencari bukti-bukti pelanggaran atau penyimpangan.

- Ancaman "Verifikasi Buta": Namun, tantangan terbesarnya adalah kecenderungan untuk melakukan "verifikasi buta". Artinya, mereka cenderung menerima narasi dominan yang positif tentang pemimpin atau sistem tanpa melakukan pengujian kritis yang mendalam. Penggunaan media sosial yang dominan di kalangan generasi muda, meskipun menawarkan akses informasi, juga menciptakan *echo chambers* dan polarisasi yang dapat memperkuat keyakinan yang ada tanpa ruang untuk falsifikasi. Misalnya, mereka mungkin hanya melihat keberhasilan bansos atau pembangunan infrastruktur, tanpa

mempertanyakan sumber dan dampak jangka panjangnya terhadap utang negara, lingkungan, atau keadilan sosial.

- Kecenderungan apatisme dan pragmatisme: Jika generasi muda merasa tidak memiliki suara, atau jika politik dianggap kotor dan tidak relevan, mereka dapat jatuh ke dalam apatisme. Apatisme ini, dari sudut pandang falsifikasi, berarti mereka menarik diri dari proses pengujian kritis. Mereka tidak lagi mencari bukti yang menyangkal klaim demokrasi, sehingga membiarkan narasi positif tanpa tantangan. Lebih lanjut, pragmatisme yang berlebihan, di mana suara mereka ditukarkan dengan insentif jangka pendek (misalnya, janji pekerjaan, bansos, atau popularitas media sosial), juga menghalangi peran mereka sebagai agen falsifikasi substantif.

- Pentingnya pendidikan kritis dan literasi Politik: Untuk mengoptimalkan peran bonus demografi sebagai agen falsifikasi yang konstruktif, diperlukan investasi besar dalam pendidikan kritis dan literasi politik. Kurikulum pendidikan harus mendorong siswa untuk berpikir skeptis, menganalisis informasi dari berbagai sumber, dan berani mempertanyakan otoritas. Literasi digital juga harus mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi disinformasi dan narasi manipulatif. Tanpa bekal ini, bonus demografi berisiko menjadi massa yang mudah dimobilisasi dan dimanipulasi, bukan warga negara yang partisipatif dan kritis.

- Demokrasi deliberatif untuk generasi muda: Konsep demokrasi deliberatif yang diusung oleh Hardiman menjadi sangat relevan. Generasi muda perlu dilibatkan dalam ruang-ruang diskusi publik yang rasional dan inklusif, di mana mereka dapat menguji ide-ide, mengkritik kebijakan, dan membangun konsensus berdasarkan argumen yang

terbaik. Ini akan melatih mereka untuk menjadi partisipan yang kritis dan informatif, alih-alih menjadi sekadar penerima informasi pasif.

Dengan kata lain, bonus demografi adalah pedang bermata dua bagi demokrasi. Potensinya sebagai kekuatan pendorong perubahan positif hanya dapat terwujud jika generasi muda memiliki daya kritis yang diasah melalui falsifikasi Popper. Tanpa itu, mereka berisiko menjadi penopang kemunduran demokrasi, secara tidak sengaja membiarkan narasi otoriter atau manipulatif menguasai ruang publik karena absennya pengujian dan sanggahan yang kuat.

KESIMPULAN

Artikel ini telah menggunakan teori falsifikasi Karl Popper sebagai kerangka analisis untuk menguji klaim kepuasan publik terhadap demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam konteks bonus demografi di Indonesia. Pendekatan falsifikasi ini membongkar pandangan dogmatis yang hanya berfokus pada verifikasi atau penguatan klaim positif, dan sebaliknya, menuntut pengujian kritis melalui pencarian bukti-bukti yang dapat menyanggah atau membuktikan kesalahan sebuah proposisi.

Berdasarkan analisis falsifikasi, klaim kepuasan publik yang tinggi terhadap demokrasi di era Jokowi, meskipun tampak meyakinkan secara empiris, tidak dapat dipertahankan sebagai indikasi demokrasi yang sehat dan substantif. Berbagai praktik dan kebijakan selama dua periode kepemimpinan Jokowi—seperti politisasi hukum (kasus Mahkamah Konstitusi), penyalahgunaan undang-undang (Omnibus Law), politisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, serta indikasi pembatasan ruang sipil dan pelemahan lembaga anti-korupsi (KPK), terimakasihsecara fundamental telah memfalsifikasi klaim bahwa demokrasi Indonesia berada dalam kondisi yang baik. Tindakan-tindakan ini merupakan manifestasi dari kemunduran demokrasi yang serius, mengikis prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas kekuasaan.

Klaim publik bahwa Jokowi adalah "pemimpin yang sangat demokratis" atau "bapak demokrasi" terbukti keliru ketika dihadapkan pada upaya falsifikasi. Hal ini sejalan dengan kritik Popper terhadap positivisme yang hanya menerima kebenaran berdasarkan observasi positif; kebaikan atau popularitas seorang pemimpin bukanlah patokan valid untuk menilai kesehatan demokrasi jika praktik-praktik fundamentalnya dilanggar. Kepuasan publik yang tinggi, terutama dari generasi bonus demografi, seringkali didasarkan pada citra personal dan dampak kebijakan populis jangka pendek, tanpa pengujian kritis terhadap motif di balik kebijakan tersebut atau dampaknya terhadap institusi demokrasi.

Popper mengajarkan bahwa integritas ilmu pengetahuan dan, dalam konteks ini, integritas demokrasi, bergantung pada kesediaan untuk terus-menerus menguji dan bahkan berusaha menyalahkan hipotesis yang ada. Publik, khususnya generasi bonus demografi yang merupakan tulang punggung masa depan bangsa, memiliki peran krusial dalam proses falsifikasi ini. Mereka tidak boleh memberikan kepuasan berlebih atau menerima begitu saja narasi dominan yang mengklaim demokrasi dalam keadaan stabil. Sebaliknya, mereka harus senantiasa mengedepankan sikap kritis, mempertanyakan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, bahkan yang tampaknya baik, untuk mengungkap potensi penyimpangan atau ancaman terhadap demokrasi.

Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa bonus demografi tidak boleh sekadar menjadi kekuatan pasif yang mudah terbuai oleh populisme atau menjadi biang penopang kemunduran demokrasi. Sebaliknya, generasi muda harus dibekali dengan daya kritis Popperian dan literasi politik yang kuat untuk aktif dalam proses falsifikasi demokrasi. Mereka harus menjadi agen yang secara sadar mencari bukti-bukti yang dapat menyanggah klaim-klaim politik, menuntut akuntabilitas, dan memperjuangkan demokrasi yang substantif. Hanya dengan pengujian kritis yang terus-menerus, seperti yang

dianjurkan Karl Popper, integritas negara dapat dijaga dari kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan erosi demokrasi yang tersembunyi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang selalu siap untuk dikritik dan difalsifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, A. F. (2025, 23 Oktober). KPU: 60 persen dari 204 juta pemilih adalah generasi muda. Antara. https://antaranews.com

Baghi, F. (Ed.). (2009). Kewarganegaraan demokrasi dalam sorotan filsafat politik. Penerbit Ledalero.

Dua, M. (2007). Filsafat ilmu pengetahuan: Telaah analitis, dinamis, dan dialektis. Penerbit Ledalero.

Hardiman, F. B. (2009). Demokrasi deliberatif. Kanisius.

Haryatmoko. (2014). Etika politik dan kekuasaan. Kompas.

Javier, F. (2024, 16 Oktober). Demokrasi Indonesia di bawah 10 tahun pemerintahan Jokowi. Harian Tempo.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2021). Bagaimana demokrasi mati. PT Gramedia Pustaka Utama.

Madung, O. G. (2018). Populisme, krisis demokrasi, dan antagonisme. Jurnal Ledalero, 17(7), 64.

Madung, O. G. (2021, Desember). Demokrasi dan kebenaran. Repository IFTK Ledalero, 887–900.

Masrafi, L. (2024, 5 Oktober). Jokowi hormati penilaian masyarakat atas 10 tahun pemerintahannya. Harian Tempo.

Nugroho, Y. (2024, 6 Maret). Ambruknya keadaan publik kita. Harian Kompas.

Popper, K. R. (1976). The logic of the social sciences. Dalam T. W. Adorno (Ed.), The positivist dispute in German sociology (G. Adey & D. Frisby, Penerj.). Heinemann. (Karya asli diterbitkan tahun 1961).

Russell, B. (2024). Sejarah filsafat barat. Pustaka Pelajar.

Sheykal, L. (2025, 24 Oktober). Pengertian bonus demografi serta dampak positif dan negatif. Media Indonesia.

Singgih, V. (2025, 25 Oktober). Politisasi bansos dinilai kian masif jelang Pilpres 2024: "Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden". BBC News Indonesia.

Suseno, B. D., Basrowi, & Sari, G. I. (2024). Eksplorasi bonus demografi, keluarga berencana, dan masa depan pembangunan keluarga. Eureka Media Aksara.

Taryadi, A. (1989). Epistemologi pemecahan masalah menurut Karl R. Popper. PT Gramedia.

Tukan, P. B. (2023). Falsifikasi Karl Popper dan sistem demokrasi di Indonesia. Akademika Ledalero, 21(1), 59–74.

Wiranggani, P. (2017). Demokrasi. Relasi Inti Media.

Zaprulkhan. (2016). Filsafat ilmu: Sebuah analisis kontemporer. PT Raja Grafindo Persada.